

POLITISASI IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

Rizky Reynaldy Chaniago
rizkyreyc710@gmail.com

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.
nhsardini@gmail.com

Dosen Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang

Abstrak

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang telah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2018 atau disebut juga Pilgub Sumut 2018. Pilgub Sumut 2018 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Eramas dan Djoss. Eramas menang di Kabupaten/Kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku non-Batak, sedangkan Djoss menang di Kabupaten/Kota yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan bersuku Batak. Dalam hal ini, diduga terjadi politisasi identitas dalam setiap proses Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dinamika politik dalam Pilgub Sumut 2018 dan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk politisasi identitas dalam Pilgub Sumut 2018.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian, dan data sekunder didapat dari Keputusan KPU Provinsi dan artikel terkait. Peneliti memfokuskan informan pada kader partai utama pengusung kedua pasangan calon, yaitu Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan, konsultan politik, serta pengamat politik setempat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses politisasi identitas dilakukan oleh kedua Paslon. Namun demikian, politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss tidak seaktif dengan apa yang dilakukan oleh Eramas. Eramas gencar memberikan stimulus kepada masyarakat terkait isu putra daerah dan isu agama, sedangkan politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss lebih kepada pendekatan yang bersifat abstrak, tidak ada keterlibatan mereka secara langsung dalam setiap kegiatan, melainkan hanya turut menghadiri saja tanpa memprakarsainya.

Proses politisasi identitas yang dilakukan Eramas dapat dikatakan sebagai strategi mereka dalam memenangkan Pilgub Sumut 2018. Hal tersebut merupakan adopsi dari dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sedangkan politisasi identitas yang dilakukan Djoss merupakan hal yang biasa sebagai pelengkap dari visi-misi mereka untuk membangun Sumut. Diharapkan kepada masing-masing pasangan calon agar lebih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai visi-misi dan program unggulan yang akan dilakukan dalam membangun daerah selama satu periode ke depan dan kepada peneliti berikutnya, diharapkan mewawancarai dan menggali informasi sebanyak mungkin kepada informan-informan kunci.

Kata Kunci: Pilgub Sumut 2018, Politisasi Identitas, Suku, Agama

**IDENTITY POLITICIZATION IN THE ELECTION OF THE 2018 GOVERNOR AND
VICE GOVERNOR OF NORTH SUMATRA**

Rizky Reynaldy Chaniago

rizkyreyc710@gmail.com

*Student of Government Science, Department of Politics and Government, Faculty of Social
and Political Science, Diponegoro University, Semarang*

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

nhsardini@gmail.com

*Lecturer of Government Science, Department of Politics and Government, Faculty of Social
and Political Science, Diponegoro University, Semarang*

Abstract

North Sumatra is one of the provinces that has held 2018 simultaneous local elections. This local election was attended by two pairs of candidates, namely Eramas and Djoss. Eramas won in the Regencies/Cities where the majority of the population was Muslim and non-Batak ethnicity, while Djoss won in the Regencies/Cities where the majority of the population was Christian and Batak ethnicity. In this case, it is thought that identity politicization took place in each process of the elections. The purpose of this research was to determine the process of political dynamics in the 2018 North Sumatra Local Election and to identify forms of identity politicization in the 2018 North Sumatra Local Election.

This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. In this study, primary data obtained through direct interviews with informants determined from the linkage of these informants with research problems, and secondary data obtained from Provincial KPU Decisions and related articles. The researcher focused the informants on the main party cadres supporting the two candidate pairs, namely the Gerindra Party and the PDI-Perjuangan Party, political consultants, and local political observers.

The results of this study indicate that the process of identity politicization is carried out by both pairs of candidates. However, identity politicization carried out by Djoss is not as active as what Eramas does. Eramas intensively provides stimulus to the community related to the issue of sons and daughters of religious issues, while the politicization of identity carried out by Djoss was more about an abstark approach, there was no direct involvement in any activity, but only attended without initiating it.

The process of identity politicization carried out by Eramas can be said to be their strategy in winning the 2018 North Sumatra Local Election. This is an adoption of the dynamics that occurred in the 2017 DKI Jakarta Local Election, while identity politicization done by Djoss is a common thing as a complement to their vision and mission to build North Sumatra. It is expected that each pair of candidates will prioritize socialization to the public about the vision and mission and superior programs that will be carried out in developing the region for the next period and to the next researcher, is expected to interview and explore as much information as possible to key informants.

Keywords: *The 2018 North Sumatra Local Election, Politicization of Identity, Ethnicity, Religion*

PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis. Pilgub secara langsung sebagai bentuk amanat normatif atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan partisipatif telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebelum tahun 2005, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan pada Juni 2005.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 menarik untuk diteliti karena masih terdapat isu identitas yang dimainkan oleh kedua pasangan calon. Pasangan calon (Paslon) nomor urut 1, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mengklaim diri mereka sebagai putra daerah Sumatera Utara yang pantas untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Mereka mengatakan demikian karena Edy telah lama tinggal dan mengerti betul permasalahan di Sumatera Utara walaupun beliau tidak terlahir di Sumatera Utara, sedangkan paslon nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dianggap sebagai calon pendatang yang mengadu nasib ke Sumatera Utara.

KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai pemenang dalam Pilgub Sumut 2018 sesuai dengan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 160/PL.03.7-Kpt/12/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Tabel 1

Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	
		Σ	%
1.	Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah	3.291.137	57,58
2.	Djarot Saiful Hidayat dan Sihar PH Sitorus	2.424.960	42,42
Jumlah		5.716.097	100,00

Sumber: KPU Provinsi Sumatera Utara, 2018

Paslon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) unggul di kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir timur Sumut dan kabupaten/kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan pasangan Djarot dan Sihar (Djoss) unggul di kabupaten/kota di pesisir barat Sumut yang mayoritas penduduknya adalah suku Batak dan beragama Kristen. Berikut adalah tabel perolehan suara Eramas di Kabupaten/Kota yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan bersuku non-Batak.

Kedua tabel di atas memperlihatkan bahwa daerah-daerah dengan populasi mayoritas Muslim memenangkan paslon nomor urut 1, sedangkan daerah-daerah dengan populasi non-Muslim terbukti memenangkan paslon nomor urut 2. Fenomena tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Fenomena tersebut tidak lepas dari isu yang dimainkan oleh pasangan calon itu sendiri dalam strategi pemenangan mereka.

Isu-isu yang berkaitan dengan etnik, agama, atau ideologi tertentu digunakan oleh sebagian elit politisi untuk membangun citra negatif lawan-lawan politiknya.¹ Politisasi merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan.² Sementara yang dimaksud identitas sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam ilmu politik dan sosiologi, yakni kategori sosial dimana orang-orang yang ditempatkan pada suatu kategori diasumsikan memiliki 'identitas' yang sama. Identitas kemudian digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dari kelompok yang bersangkutan.³

Fenomena politisasi identitas dapat dijelaskan menggunakan teori populisme, populisme Islam misalnya. Populisme Islam, pada gilirannya, berubah arah menjadi populisme Islam model baru yang digunakan oleh sekelompok populis yang tergabung dalam aliansi antar kelas guna mendapatkan kekuasaan.⁴ Definisi mengenai populisme sebenarnya belum didefinisikan secara pasti oleh para ilmuwan, namun setidaknya ada tiga variasi dalam mendefinisikan populisme, yaitu populisme sebagai ideologi, populisme sebagai *discursive*

¹ Mietzner, M. (2014). Indonesia's 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy* Vol.4 No.4. Hlm. 111-125.

² Adediji, A. (2016). *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*. Berlin: Springer VS.

³ Burke, P. J. (2003). *Introduction*. In P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*. New York: Plenum Publishers.

⁴ Vedi R. Hadiz. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press.

style, dan populisme sebagai strategi.⁵ Peneliti dalam hal ini berpendapat bahwa populisme yang terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018 adalah populisme yang dimaknai sebagai strategi, yaitu isu populis dimainkan aktor politik untuk menjatuhkan lawan politiknya dan untuk memenangkan kompetisi dalam Pilkada.

Isu yang paling terlihat dalam peregelaran Pilgubsu 2018 adalah terkait politisasi identitas, terutama terkait suku dan agama. Edy Rahmayadi berpendapat bahwa sejatinya masih banyak putra/putri daerah di Sumatera Utara yang layak untuk maju di Pilgubsu 2018, namun mengapa harus mengambil calon dari luar Sumatera Utara yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan emosional dengan Sumatera Utara, apalagi memahami persoalan yang ada di Sumatera Utara. Menyikapi isu putra daerah tersebut, Djarot menganggap dirinya maju di Pilgub Sumut 2018 semata-mata hanya untuk mengabdikan dirinya, dimana pun beliau ditugaskan sepanjang itu di wilayah NKRI dan sepanjang itu tidak menabrak ketentuan yang berlaku. Belum lagi isu terkait agama, dimana Sihar Sitorus sebagai cawagub yang berpasangan dengan Djarot adalah seorang Nasrani.

Peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai lokasi penelitian karena penduduknya yang begitu heterogen dan majemuk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Dengan jumlah penduduk dan wilayah terbesar di Pulau Sumatera, Sumatera Utara memiliki posisi strategis dalam konteks politik.

Semua agama yang ada di Indonesia juga ada di Sumatera Utara. Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Sumatera Utara, namun penganut agama Kristen juga sangat besar di Sumatera Utara.⁶ Disusul dengan agama lainnya, seperti Katolik, Hindu, Budha, dan agama nenek moyang, seperti Parmalim yang merupakan agama asli suku Batak. Sumatera Utara memiliki keragaman agama, suku, dan antargolongan. Suku yang dominan di Sumatera Utara adalah Batak, Jawa, Nias dan Melayu.

Masyarakat Sumatera Utara memiliki pilihan politik yang berbeda dalam peregelaran pemilihan umum, seperti dalam Pilgubsu 2018 ini. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak terlalu terbuka dalam hal pilihan politik. Jika diteliti secara

⁵ Gidron, Noam dan Bart Bonikowski. (Tanpa Tahun). "Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda." *Working Paper Series: Weatherhead Center for International Affairs Harvard University*. No. 13-0004. Hlm. 1-5.

⁶ Bawaslu RI. (2017). *Laporan Penelitian : Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*. Jakarta: Bawaslu RI.

mendalam, masyarakat cenderung menentukan pilihannya berdasarkan faktor kesamaan agama dan suku bahkan termakan isu politik identitas yang dimainkan pasangan calon.

Clifford Geertz mengemukakan pandangannya tentang ikatan primordialisme dalam politik yang beberapa pandangannya mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa untuk konteks Indonesia dua ikatan primordialisme terpenting adalah suku dan agama. Hal tersebut sama seperti apa yang terjadi pada Pilgubsu 2018 ini.⁷

Masyarakat Batak dan beragama Kristen cenderung mendukung pasangan Djarot-Sihar (Djoss), sedangkan masyarakat non-Batak dan beragama Islam cenderung mendukung pasangan Edy-Musa Rajekshah (Eramas). Kecenderungan ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Ian Pasaribu dan Irfan Prayogi yang mengatakan bahwa kemenangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah tidak terlepas dari pemanfaatan imajinasi kolektif yang pernah lekat dalam stereotip Umat Islam (Aksi Bela Islam 212). Hal ini terbukti dengan kemenangan Eramas pada basis daerah kabupaten/kota yang bermayoritas Agama Islam.⁸

Berdasarkan fenomena-fenomena politik identitas dalam Pilgub Sumut 2018 di atas, maka peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul "*Politisasi Identitas dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*".

KERANGKA TEORI

Populisme

Noam Gidron dan Bart Bonikowski adalah ilmuwan politik yang mencoba membuat rangkuman komparatif untuk melihat pertarungan definisi populisme. Menurut Gidron dan Bonikowski perbedaan definisi populisme bergantung dari konteks sosial, ekonomi, budaya dan politik. Ia kemudian merangkum 3 definisi populisme yang berkembang di dunia ini yaitu populisme sebagai sebuah ideologi, populisme sebagai *discursive style* dan populisme sebagai strategi politik.⁹ Namun demikian, dalam penelitian ini penulis hanya membahas populisme yang dipahami sebagai strategi politik saja.

⁷ Osbin Samosir. 2017. *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat (Sudi Pileg: PDI Perjuangan dan Partai Golkar Tahun 2004 dan 2009)*. Jakarta: UKI Press. Hlm. 25.

⁸ Ian Pasaribu dan Irfan Prayogi, 2018. Bekerjanya Politiisasi Identitas pada Pilkada Sumut 2018 (Menakar Pengaruh Isu Agama terhadap Kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah). *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol.4 No.1 2018*. Hlm. 11-28

⁹ Noam Gidron dan Bart Bonikowski. (Tanpa Tahun). "Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda." *Working Papper Series: Weatherhead center for Intenational Affairs Harvard University*. No. 13-0004. Hlm. 1-5.

Populisme sebagai strategi politik merupakan fenomena dimana aktor politik mengambil hati rakyat guna meraih kekuasaannya. Hal tersebut biasanya disertai dengan strategi penawaran program-program politik yang sesuai dengan aspirasi publik. Strategi lain adalah upaya mobilisasi massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Cara aktor politik mengorganisir biasanya menggunakan organisasi atau media.

Politik Identitas

Politik identitas merupakan sikap politik yang fokus pada sub kelompok dan merujuk pada aktivisme atau pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya. Isunya pada orientasi politik kelompok subnasional melihat perbedaan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁰ Di luar itu, politik identitas juga dapat mengacu pada identitas kebangsaan atau identitas diri (*self-identity*) yang melintasi batas-batas etnik atau nasionalisme, misalnya isu wanita dan imigran.¹¹

Alcoff and Mohanty (2006: 2) menunjukkan bahwa pertarungan politik yang memanipulasi dengan isu-isu identitas akan menyebabkan elit-elit politik cenderung mudah menggunakan isu-isu yang dapat memobilisasi massa secara efektif. Selain itu, penggunaan isu-isu identitas juga menggambarkan ketidakmampuan partai-partai politik untuk menunjukkan kinerja secara substantif, sehingga pertanyaan lebih diarahkan pada isu-isu non substansial. Isu-isu substansial lebih dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan isu-isu kebijakan.

Politik identitas bicara tentang ikatan primordialisme yang terjalin di tengah masyarakat. Primordialisme diperkenalkan pertama kali oleh Edward Shils (1957) yang menemukan berbagai ikatan sosial yang dibedakan atas ikatan personal, primordial, dan sakral. Ikatan-ikatan tersebut masih bertahan dalam dunia yang sudah modern. Pendekatan ini beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial dikarakteristikan oleh gambaran kewilayahan, agama, kebudayaan, bahasa, dan organisasi sosial yang memang disadari secara objek sebagai hal yang tidak bisa dibantah.¹² Kegoncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa sebab

¹⁰ Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*. Ashgate. Hlm. 268.

¹¹ Ari Ganjar Hardiansyah. (2017). "Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014". *Jurnal Bawaslu Vol.3 No.2 2017*, Hlm. 169-183.

¹² Sugiprawaty. (2009). Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Hlm. 32.

yang seringkali timbul bersama dan berlawanan tujuan, secara deskriptif, masalah-masalah yang timbul adalah hubungan darah, ras/suku, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian, dan data sekunder didapat dari Keputusan KPU Provinsi dan artikel terkait. Peneliti memfokuskan informan pada kader partai utama pengusung kedua pasangan calon, yaitu Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan, konsultan politik, serta pengamat politik setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Politik dalam Pilgub Sumut 2018

Dinamika politik dalam Pilgub Sumut 2018 yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai kegagalan pencalonan JR Saragih dan Ance Selian, ketidakikutsertaan gubernur petahana, rangkap jabatan Edy Rahmayadi, dan polemik e-KTP Djarot Saiful Hidayat.

Bupati Simalungun dua periode, Jopinus Ramli Saragih (JR Saragih) dan Ketua DPW PKB Sumut, Ance Selian tetap dinyatakan gagal atau tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pilgub Sumut 2018 seperti yang dimuat dalam berita acara KPU Sumut Nomor 95/PL.03-BA/12/Prov/III/2018. Hal tersebut dikarenakan ketidaklengkapan dokumen persyaratan bakal calon JR Saragih terkait legalisir fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) oleh instansi yang berwenang sesuai dengan isi pasal 42 ayat (1) poin p PKPU RI Nomor 3 Tahun 2017. KPU Sumut menilai bahwa legalisir ijazah SMA milik JR Saragih tidak sah. KPU Sumut mendapatkan konfirmasi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bahwa mereka belum pernah melegalisir ijazah SMA atas nama siswa JR Saragih.¹⁴ KPU Sumut menduga pihak JR Saragih telah melakukan pemalsuan legalisir ijazah/STTB sebagai syarat calon dalam Pilgub Sumut 2018 dan menyatakan bakal paslon JR Saragih dan Ance Selian dinyatakan tidak memenuhi syarat.

¹³ Clifford Geertz. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Book. New York Inc. Hlm. 263.

¹⁴ JR Saragih merupakan lulusan tahun 1990 dari SMA Ikhlas Prasasti Jakarta yang beralamat di Jalan Raya Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Namun SMA tersebut tutup pada tahun 1994, sehingga legalisir ijazah/STTB JR Saragih dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur petahana Sumut, Tengku Erry Nuradi yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Sumut pada akhirnya tidak dapat mengikuti Pilgub Sumut 2018. Erry Nuradi gagal menjadi peserta Pilgub Sumut 2018 karena tidak ada partai politik yang mengusungnya, padahal beliau sendiri merupakan kader dan Ketua Partai Nasdem Sumut. Tengku Erry awalnya diperkirakan akan maju di Pilgub Sumut 2018 melalui Partai Nasdem dan berkoalisi dengan Partai Golkar, PKPI, dan PKB. Namun seiring berjalannya waktu, Partai Nasdem dan Partai Golkar berubah haluan mendukung paslon nomor urut 1 (Eramas), begitu pun dengan sikap yang ditunjukkan oleh PKPI dan PKB yang sama-sama menarik dukungannya dari Tengku Erry. Shohibul Anshor Siregar berpendapat bahwa semua yang terjadi di Sumut merupakan desain dari Jakarta, yaitu penguasa partai di pusat. Beliau menyebutnya dengan istilah *'Amangboru dan Namboru penguasa partai di Jakarta'*. Penguasa partai di Jakarta-lah yang menentukan siapa-siapa yang akan dicalonkan di daerah, sedangkan para pimpinan partai di tingkat provinsi tidak dapat berbuat banyak. Partai Nasdem mampu membaca peta politik yang ada bahwa Tengku Erry kian hari semakin menurun eksistensinya dan mau tidak mau harus dicari calon lain yang lebih eksis dan memiliki elektabilitas yang tinggi pula, yaitu pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah.

Pencalonan Edy Rahmayadi untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara 2018 sempat menuai kontroversi, apalagi saat itu beliau berstatus sebagai perwira tinggi TNI aktif dan sedang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Edy Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI pun juga mendapat perhatian serius bagi masyarakat. Pada awal pencalonan sampai terpilih sebagai Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi bersikukuh mempertahankan jabatannya di PSSI tersebut dengan alasan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah, jadi harus dituntaskan, walaupun pada akhirnya beliau mundur dari posisi Ketua Umum PSSI tersebut. Edy Rahmayadi resmi megundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI tepat ketika beliau memberikan kata sambutan dalam Kongres PSSI yang digelar di Nusa Dua, Bali pada 20 Januari 2019. Sebelumnya, Edy Rahmayadi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres yang digelar pada 10 November 2016, lalu beliau cuti sejak 12 Februari 2018 sampai akhir Juni 2018 untuk keperluan pencalonan sebagai cagub dalam Pilgub Sumut 2018. Belajar dari suara-suara yang seolah tidak suka akan majunya Edy sebagai cagub pada Pilgub Sumut 2018, menunjukkan bahwa ada perlawanan dari pendukung paslon lain yang merasa tersaingi dengan eksistensi Edy Rahmayadi. Sempat muncul penolakan keras oleh masyarakat ke Edy Rahmayadi dengan memviralkan *#EdyOut* di media sosial, ditambah lagi

dengan memburuknya prestasi Timnas Indonesia, membuat Edy Rahmayadi harus memilih untuk fokus kemana, Sumut atau PSSI.

Pencalonan Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Gubernur pada Pilgub Sumut 2018 menuai polemik di tengah masyarakat terkait kepemilikan e-KTP beliau sebagai penduduk Kota Medan. Disdukcapil Kota Medan diduga melakukan pilih kasih kepada Djarot daripada penduduk Kota Medan lainnya. Pada saat itu, diketahui bahwa masyarakat Kota Medan masih banyak yang belum memiliki e-KTP, namun mengapa Djarot yang terbilang baru tinggal di Kota Medan dengan mudahnya mengurus dan mendapatkan e-KTP. Polemik kepemilikan e-KTP Kota Medan milik Djarot sebenarnya tidak perlu diributkan, namun momen Pilgubsu 2018-lah yang membuat isu tersebut menjadi panas. Jika dikatakan niatan Djarot mengurus KTP Sumut khususnya Kota Medan adalah sebagai syarat pencalonan dirinya sebagai calon gubernur, maka hal tersebut adalah kurang tepat. Namun, jika dikatakan niatan Djarot dalam mengurus e-KTP Sumut adalah untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah kini sudah menjadi warga Sumut dan layak untuk dipilih dapat dikatakan bahwa hal tersebut ada benarnya. Di dalam pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada disebutkan bahwa bakal calon harus memiliki KTP sesuai daerah dimana dia mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Iklim dalam kesulitan mengurus e-KTP lah yang menjadikan isu e-KTP Djarot menjadi hangat dibicarakan, khususnya bagi penduduk Kota Medan.

Bentuk-bentuk Politisasi Identitas dalam Pilgub Sumut 2018

Dalam setiap pergelaran Pemilu, baik itu Pilpres, Pileg, maupun Pilkada, agama dan suku menjadi faktor yang sangat penting dalam memengaruhi pemilih agar memilih Paslon tertentu. Baik pasangan calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) maupun Djarot dan Sihar Sitorus sama-sama melakukan politisasi identitas.

Bentuk-bentuk Politisasi Identitas Eramas

Eramas banyak belajar dari apa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk meraih simpati para pemilih. Pilkada DKI Jakarta 2017 memberikan pengaruh yang sangat besar pada Pilkada berikutnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk pada Pilgub Sumut 2018 ini. Citra yang dibangun oleh Eramas adalah merupakan Paslon yang Islami yang dekat dengan ulama dan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi umat Muslim di Sumatera Utara. Salah satu informan yang penulis wawancarai menyebutnya dengan istilah

“*Anies effect*”, yaitu rangkaian peristiwa pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang identik dengan politisasi Agama, khususnya Agama Islam yang pada akhirnya dapat menghantarkan Paslon Anies-Sandi ke kursi tertinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proses penggalangan isu agama dilakukan oleh Eramas yaitu dengan melanjutkan politisasi identitas Pilkada DKI Jakarta 2017.¹⁵

Bertitik tolak dari latar belakang primordial lawan politiknya, Eramas memancing isu dengan memberikan stimulus kepada masyarakat bahwa mereka adalah putra asli daerah yang tumbuh dan besar di Sumatera Utara yang pantas untuk memimpin daripada pasangan lawan yang merupakan orang pendatang yang tidak paham dengan kondisi yang ada di Sumatera Utara. Hal tersebut lebih ditujukan kepada Djarot daripada Sihar karena Sihar sendiri adalah bersuku Batak, walaupun beliau kelahiran Jakarta. Namun di lain sisi, Edy sebenarnya bukan kelahiran Sumatera Utara, melainkan kelahiran Sabang (Aceh). Walaupun Edy Rahmayadi kelahiran Aceh, beliau sejak kecil sampai berkarir di militer lebih banyak ditugaskan di Sumatera Utara.

Citra sebagai Paslon yang Islami terlihat dari seringnya dilakukan Gerakan Subuh Berjamaah oleh Eramas di penjuru Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kegiatan ini berupa melaksanakan Sholat Subuh berjamaah bersama ratusan masyarakat yang dilanjutkan dengan tausiyah oleh ulama setempat, dan diakhiri dengan sambutan/pidato oleh Eramas. Eramas menghimbau jamaah agar senantiasa merapatkan shaf, menegakkan Sholat Subuh berjamaah di masjid, mempererat *ukhuwah Islamiyah*, dan intinya adalah mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat agar Eramas dapat meraih kemenangan pada 27 Juni 2018. Eramas juga menghimbau masyarakat agar memulai hari pencoblosan dengan melakukan Sholat Subuh berjamaah di masjid atau musholah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Eramas dalam membangun citra yang Islami juga ditunjukkan dengan melakukan ziarah kubur. Edy Rahmayadi maupun Musa Rajekshah sejak awal masa kampanye sering melakukan ziarah kubur ke makam tokoh agama Islam dan tokoh nasional di Sumatera Utara.

Eramas juga mendapat manfaat dari adanya Yayasan Haji Anif (YHA). YHA merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. YHA didirikan pada tahun 2000 oleh Haji Anif, yaitu ayah dari Musa Rajekshah. Saat ini, YHA diketuai oleh Musa Rajekshah sendiri. Dalam perjalanannya, YHA telah banyak memberikan bantuan fisik

¹⁵ Sayed Muhammad Daulay, Heri Kusmanto, dan Abdul Kadir. “Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018”. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9 (1) Juni 2019: 51-58.

maupun non fisik kepada masyarakat di Kota Medan dan Sumatera Utara pada umumnya. YHA telah mendirikan sekolah formal gratis yang tersebar di Medan, Langkat, Mandailing Natal, Batubara, Samosir, dan Deli Serdang, serta mendirikan sejumlah gedung di kompleks Universitas Negeri yang ada di Kota Medan, seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan UIN Sumatera Utara. YHA telah banyak memberikan bantuan pendidikan dan sosial di Sumatera Utara. Hal ini menjadi modal atau keuntungan tersendiri bagi Eramas untuk memikat hati para pemilih di Sumatera Utara. Satu hal yang menjadi perhatian pada Pilgub Sumut 2018 adalah seringnya Eramas melalui YHA memberikan bantuan mobil pembersih masjid secara gratis yang bertugas membersihkan masjid-masjid maupun musholah yang ada di Sumatera Utara. YHA memang murni tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik, khususnya dalam pencalonan Ketua YHA, Musa Rajekshah sebagai cawagub pada Pilgub Sumut 2018. Namun, dengan adanya YHA ditambah lagi dengan giatnya YHA memberikan bantuan kepada masyarakat, memudahkan Eramas untuk mengenalkan siapa mereka kepada masyarakat tanpa usaha yang terlalu berarti. Masyarakat sudah terlebih dahulu mengenal Eramas, khususnya Musa Rajekshah daripada paslon Djoss. Edy dan Ijeck telah lebih banyak berbuat kepada masyarakat Sumut khususnya masyarakat Muslim dan kegiatan tersebut seolah sudah mengakar dan rutin dilakukan oleh YHA sendiri.

Eramas dengan kombinasi cagub dan cawagub Muslim-Muslim memudahkan mereka untuk mendapatkan dukungan dari Ulama terkenal, khususnya UAS. Apalagi UAS memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memengaruhi masyarakat untuk menentukan pilihannya. UAS tidak pernah secara langsung menyebut Eramas untuk dipilih, namun dengan himbuan beliau untuk memilih pemimpin yang seakidah membuat masyarakat langsung paham apa yang UAS maksud. Memang benar bahwa Edy dan Djarot merupakan seorang Muslim, tetapi karena wakil dari Djarot beragama Kristen, ditambah lagi pengalaman Djarot yang dekat dengan Basuki Thajaja Purnama, alias Ahok membuat masyarakat lebih memilih Eramas daripada Djoss.

Mendekati masa tenang, digelar suatu acara besar yaitu kampanye akbar bertajuk "*Doa untuk Sumut Bermartabat*" pada Sabtu, 23 Juni 2018 di Lapangan Merdeka Medan yang dihadiri oleh ribuan jemaat. Tokoh-tokoh nasional turut hadir dalam acara tersebut, seperti UAS, Tengku Zulkarnain, serta Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. UAS, Tengku Zulkarnain dan Gatot Nurmantyo silih berganti menyampaikan orasi dan doa-doa yang diaamiinkan oleh ribuan jemaat, padahal pada saat itu suasana dalam keadaan hujan yang cukup deras. Pada kesempatan tersebut, UAS berdoa agar Allah memberikan Sumatera Utara

pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada-Nya dan pemimpin yang sayang pada umat. Umat juga diingatkan untuk memilih pemimpin yang berasal dari Sumatera Utara dan jangan menghinakan diri mereka dengan memilih pemimpin yang berasal dari luar Sumatera Utara. Kehadiran UAS dan Gatot Nurmantyo tersebut dapat menambah potensi elektoral Eramas dan hal ini tentu mampu mendongkrak suara Eramas pada Pilgub Sumut 2018 kemarin. Dengan adanya seruan tersebut, umat menjadi lebih yakin dan mantap untuk menjatuhkan pilihannya pada Eramas di hari pemungutan suara pada 27 Juni 2018.

Namun demikian, Walid Musthafa Sembiring mengatakan bahwa UAS bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan Eramas. Hal tersebut dapat diterjemahkan bahwa memang benar UAS bukan merupakan bagian dari Tim Pemenangan yang secara normatif turut bertugas memenangkan Eramas. Namun demikian, dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa UAS secara langsung berjasa dalam membantu Eramas memenangkan Pilgubsu 2018. UAS berhasil membangun opini dan meyakinkan masyarakat untuk memilih Eramas sebagai Paslon yang tepat untuk memimpin Sumatera Utara pada periode berikutnya. Dengan wawasannya yang luas dan dibekali dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, beliau mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dilihat dari sudut pandang agama.

Bentuk-bentuk Politisasi Identitas Djoss

Ketika penunjukan Djarot sebagai Bakal Cagub Sumut, Ketua Umum PDI-P Megawati berharap kepada warga Sumut untuk mau menerima dan memilih Djarot. Megawati beranggapan Djarot akan menang karena secara demografi penduduk Sumut banyak yang bersuku Jawa, yaitu sekitar 33%. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi adopsi paham primordialistik dalam Pilgub Sumut 2018. Ketika pengumuman resmi pada 7 Januari 2018, PDI-P menetapkan Djarot dan Sihar Sitorus sebagai Cagub dan Cawagub dalam Pilgubsu 2018. Djarot merepresentasikan suku Jawa dan Sihar Sitorus sebagai representasi suku Batak. Sebagaimana diketahui, Jawa dan Batak merupakan dua suku mayoritas yang ada di Sumatera Utara yang jika digabungkan jumlahnya sekitar 74%.

Seiring berjalannya waktu, Djoss lebih banyak memberikan jawaban atas segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka ketika dihadapkan dengan isu etnisitas/kesukuan. Isu tersebut misalnya terkait putra daerah. Dari pihak Eramas, Djoss dianggap sebagai calon impor yang hanya mencari peruntungan di Sumut dan juga dikatakan bahwa Sumut tidak kekurangan orang-orang hebat untuk memimpin Sumut sehingga tidak perlu calon impor dari daerah lain.

Menyikapi narasi-narasi tersebut, Djoss tidak segarang Eramas dalam memainkan isu etnisitas. Djoss lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap WNI berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Kehadiran Djarot diharapkan mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang ada di Sumatera Utara, apalagi dalam beberapa periode kepemimpinan Gubernur terakhir selalu terjerat korupsi. Untuk itu, Djoss mengklaim dirinya sebagai pasangan yang bersih dan mampu merubah segala hal kurang baik di Sumatera Utara dengan jargonnya adalah SUMUT (Semua Urusan MUDah dan Transparan). Tidak dapat dipungkiri, Djoss juga melawan tuduhan yang diarahkan ke mereka dengan turut menyinggung masalah etnisitas. Ketika Djarot dianggap sebagai calon pendatang dari luar Sumut, pihak Djoss juga menuding bahwa Musa Rajekshah adalah calon yang berasal dari luar Sumut dimana Musa Rajekshah adalah berasal dari keturunan Pakistan.

Selain itu, Djoss melalui tim pemenangannya sempat membuat spanduk penolakan Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk hadir ke Medan dalam rangka memberikan tausiyah dan tabligh akbar di wilayah Sumut selama tiga hari, yaitu pada 22-24 Juni 2018. Dalam spanduk tersebut, tertulis kalimat ‘Tolak kehadiran masyarakat luar Sumut Ustad Abdul Somad & Ustad Bachtiar Nasir mencampuri Pilgubsu 2018 di Sumut’, dimana pada pojok bawah spanduk tertulis Gerakan Masyarakat Peduli Pilkada Sumatera Utara (GMPP) Sumut yang diyakini sebagai pembuat spanduk tersebut.

Menanggapi hal tersebut, UAS memberikan tanggapan bahwa beliau datang ke Sumut bukan sebagai pendatang, melainkan pulang kampung. Untuk meyakinkan masyarakat, beliau mengeluarkan KTP-nya dan membacakan isinya, disebutkan bahwa UAS bernama asli Abdul Somad Batubara, tempat dan tanggal lahir Silo Lama Kabupaten Asahan, 18 Mei 1977. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa UAS adalah penduduk asli Sumut, bukan sebagai pendatang seperti yang disebutkan dalam spanduk penolakan yang dituding dibuat oleh massa pendukung Djarot. Spanduk dan pernyataan UAS tersebut seakan menampar balik Djarot sebagai Calon Gubernur Sumut, pasalnya Djarot sendiri merupakan bukan penduduk asli Sumut, atau dengan kata lain Djarot-lah sebenarnya yang pendatang.

Bicara tentang agama, Djoss tidak seaktif Eramas yang terlibat langsung dalam setiap acara besar keagamaan, khususnya Islam. Adapun proses penggalangan isu agama dilakukan oleh Sihar Sitorus adalah dengan mengunjungi gereja dan Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi yang tujuannya tidak jauh beda seperti yang dilakukan Eramas. Jika Eramas ingin

merebut simpati dari masyarakat Muslim, maka Sihar Sitorus ingin mendapatkan simpati dari masyarakat Kristen yang ada di Sumatera Utara.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Dairi dan melakukan kampanye di halaman Sopotogodang HKBP Sidikalang, Sihar Sitorus menempatkan dirinya sebagai orang yang lebih cocok untuk memimpin Sumut karena dirinya representasi orang Batak dan Kristen di Pilgubsu 2018. Kabupaten Dairi sendiri mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen (72%) dan hal ini membuat Sihar yakin bahwa Djoss akan menang telak di Kabupaten ini. Namun, untuk menghindari label bahwa Djoss hanya mengincar suara dari masyarakat Kristen, Djoss juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada ulama dan masyarakat lintas agama di Sumatera Utara.

PENUTUP

Simpulan

Politisasi identitas terjadi jika komposisi penduduk yang berbeda identitas menunjukkan angka yang berimbang di suatu daerah, khususnya mengenai suku dan agama. Pilgub Sumut 2018 menunjukkan adanya pertarungan antara Islam dan Kristen, juga Batak dan non-Batak (Jawa-Melayu). Eramas merepresentasikan Jawa-Melayu dan Islam, sedangkan Djoss merepresentasikan Batak dan Kristen, walaupun faktanya kedua paslon tersebut juga melakukan kampanye di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Pilkada DKI Jakarta 2017 memberikan pengaruh yang cukup signifikan di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Utara. Dengan kata lain, Pilgub Sumut 2018 merupakan kelanjutan dari dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, khususnya mengenai isu-isu identitas yang digulirkan dalam setiap tahapan pilkada. Proses politisasi identitas yang dilakukan oleh Eramas dapat dikatakan sebagai strategi mereka dalam memenangkan Pilgub, hal tersebut merupakan adopsi dari dinamika yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sedangkan politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss merupakan hal yang biasa, yaitu sebagai pelengkap dari visi dan misi mereka dalam membangun Sumatera Utara jika kelak mereka terpilih.

Saran

Politik identitas akan selalu ada dalam setiap kegiatan politik, termasuk Pilgub. Diharapkan kepada masing-masing pasangan calon agar lebih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai visi-misi dan program unggulan yang akan dilakukan dalam

membangun daerah selama satu periode ke depan, dengan demikian masyarakat akan paham calon mana yang serius ingin membangun daerah dan mana yang tidak. Pada Pilgub Sumut 2018 walaupun isu identitas dimainkan, namun konflik atau gesekan di tengah masyarakat tidak terjadi seperti yang terjadi pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal ini merupakan keunikan tersendiri bagi Sumatera Utara, walaupun beragam suku dan agama, serta terdapat isu identitas pada Pilgub Sumut 2018 tidak membuat masyarakat terpecah belah dan saling serang fisik, apalagi saling melukai. Hal seperti ini lah yang harus dipertahankan oleh masyarakat dan pasangan calon untuk selalu menjaga kondusifitas di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adediji, A. (2016). *The Politicization of Ethnicity as Source of Conflict: The Nigerian Situation*. Berlin: Springer VS.
- Alcoff, L. M., dan Mohanty, S. P. (2006). *Reconsidering Identity Politics: An Introduction*. In L. M. Alcoff, M. Hames-Garcia, S. P. Mohanty, & P. M. L. Moya (Eds.), *Identity Politics Reconsidered*. New York: Palgrave Macmillan.
- Burke, P. J. (2003). *Introduction*. In P. J. Burke, T. Owens, R. T. Serpe, & P. A. Thoits (Eds.), *Advances in Identity Theory and Research*. New York: Plenum Publishers.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Book. New York Inc.
- Hadiz, Vedi R. (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middel East*. Cambridge University Press.
- Samosir, Osbin. (2017). *Keterwakilan Politik Kristen di Basis Islam yang Kuat (Sudi Pileg: PDI Perjuangan dan Partai Golkar Tahun 2004 dan 2009)*. Jakarta: UKI Press.
- Shils, Edward. (1957). "Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties". *British Journal of Sociology*, 8.
- Wiarda, H. J. (2014). *Political Culture, Political Science, and Identity Politics: An Uneasy Alliance*. Ashgate.

Jurnal

- Daulay, S.M., Kusmanto, H. & Kadir, A. (2019). "Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018". *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*. 9 (1): 51-58.
- Gidron, Noam dan Bart Bonikowski. (Tanpa Tahun). "Varieties of Populism: Literature Review and Research Agenda." *Working Papper Series: Weatherhead center for Intenational Affairs Harvard university*. No. 13-0004. Hlm. 1-5.
- Hardiansyah, Ari Ganjar. (2017). "Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014". *Jurnal Bawaslu Vol.3 No.2 2017*, Hlm. 169-183.
- Mietzner, M. (2014). "Indonesia's 2014 Elections: How Jokowi Won and Democracy Survived". *Journal of Democracy Vol.4 No.4*. Hlm. 111-115.
- Pasaribu, Ian dan Irfan Prayogi. (2018). "Bekerjanya Poliitisasi Identitas pada Pilkada Sumut 2018 (Menakar Pengaruh Isu Agama terhadap Kemenangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah)". *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol.4*. Hlm. 11-28.

Lainnya

- Bawaslu RI. (2017). *Laporan Penelitian : Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 160/PL.03.7-Kpt/12/Prov/VII/2018 tentang *Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018*.
- Sugiprawaty. (2009). Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008). *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.